

**Implementasi Program Penanggulangan dan Penyalagunaan
Narkoba di Kalangan Milenial di Kabupaten Sidoarjo**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Sosial (S.Sos) dalam Bidang Ilmu Politik**



Oleh:

PUSPITA PRIHANDINI

NIM. I71216049

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
JULI 2020**

PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

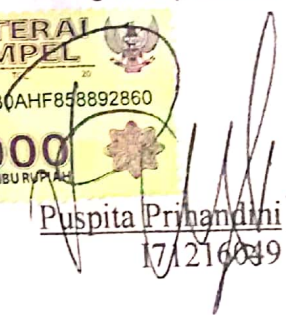
Nama : Puspita Prihandini
NIM : I71216049
Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Implementasi Program Penanggulangan Dan Penyalagunaan
Narkoba Di Kalangan Milenial Di Kabupaten Sidoarjo

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan di lembaga manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Sidoarjo, 26 Juli 2020

Yang menyatakan



Puspita Prihandini
I71216049

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang dilakukan oleh:

Nama : Puspita Prihandini

NIM : I71216049

Program Studi : Ilmu Politik

Yang berjudul: “ Implememntasi Program Penanggulangan Dan Penyalagunaan Narkoba Di Kalangan Milenial Di Kabupaten Sidoarjo”, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 26 Juli 2020

Pembimbing



Zaky Ismail M.Si

NIP : 198212302011011007

PENGESAHAN

Skripsi oleh Puspita Prihandini dengan judul: “Implementasi Program Penanggulangan dan Penyalagunaan Narkoba di Kalangan Milenial di Kabupaten Sidoarjo” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 12 Agustus 2020.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Zaky Ismail M.Si

NIP : 198212302011011007

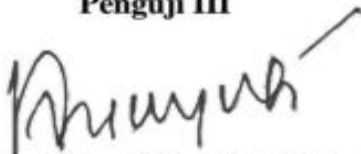
Penguji II



Dr. Khoirul Yahya, M.Si

NIP : 197202062007101003

Penguji III



Dr. Ahmad Suvuthi, M.Ag M.Si

NIP : 197407212006041001

Penguji IV



Holilah, S.Ag M.Si

NIP : 197610182008012008

Dekan

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UN Sunan Ampel Surabaya**



Prof. Achmad Muzakki, M.Ag Grad.Dip.SEA.,M.Phil,Ph.D

NIP : 197402091998031002

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademi UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Puspita Prihandini
NIM : I71216049
Fakultas / Jurusan : FISIP / Ilmu Politik
E-mail Address : prihandinipuspita@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eklusif atas karya ilmiah: Skripsi.

Yang berjudul :

“Implementasi Program Penanggulangan dan Penyalagunaan Narkoba di kalangan Milenial di Kabupaten Sidoarjo”

Beserta perangkat yang diperlukan (jika ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juli 2020

Penulis



Puspita Prihandini

indak lanjutan terhadap para pengguna narkoba, bukan Cuma pengguna namun pengedar dan penjual juga ditindak lanjuti dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan program ini menjadi wewenang instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan kewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi narkoba agar tidak semakin menyebar. Dalam hal ini generasi milenial mempunyai peran penuh dalam upaya pencegahan penyebaran narkoba di Kabupaten Sidoarjo khususnya, karena mereka merupakan generasi penerus. Mereka para generasi milenial ini perlu diberi perhatian lebih agar mereka lebih terhindarkan dari penyuluhan narkoba.

- Pedoman Wawancara
- Jadwal Penelitian
- Surat keterangan (Bukti melakukan penelitian)
- Dokumentasi saat wawancara
- Bukti sosialisasi melalui media massa
- Biodata Peneliti

Tabel 3.1 Daftar Nama Informan Penelitian.....47

Tabel 4.1 Struktur organisasi BNN Sidoarjo.....	60
Table 4.2 Struktur Unit Kerja Pemberantasan.....	60
Table 4.3 Struktur Unit Kerja Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat.....	61
Table 4.4 Struktur Unit Kerja Rehabilitasi.....	61
Table 4.5 Jenis Narkoba yang Paling Populer.....	62
Table 4.6 Jenis Narkoba yang Paling Banyak Dikonsumsi.....	62
Table 4.7 Pengguna Narkoba Berdasarkan Status Pasien Tahun 2019.....	80
Table 4.8 Pengguna Narkoba Berdasarkan Jenis Kelamin.....	81
Table 4.9 Penggunaan Narkoba Berdasarkan Pekerjaan.....	81
Table 4.10 Penggunaan Narkoba Berdasarkan Usia.....	82
Table 4.11 Penggunaan Narkoba Berdasarkan Wilayah Perkecamatan.....	83

Penanggulangan adalah suatu upaya untuk mencegah hal yang tidak diinginkan ataupun hal yang negatif. Penanggulangan adalah langkah awal yang dilakukan untuk tidak meluasnya sesuatu hal yang tidak diinginkan. Contohnya seperti penanggulangan dan pencegahan penyebaran narkoba. Narkoba sendiri adalah singkatan dari narkotika dan obat berbahaya yang berasal dari tanaman sintesis maupun non sintesis yang bisa mengurangi kesadaran, hilangnya kepekaan rasa dalam tubuh sampai menghilangkan rasa nyeri dalam tubuh dan juga membuat kita menjadi kecanduan.³ Jika dipakai berulang kali, terjadi kebiasaan, dan menyebabkan gangguan kesehatan pada tubuh mereka, perasaan dan perilakunya, jika sudah seperti itu maka, sudah tidak ada lagi rasa kenikmatan, akan tetapi yang ada hanyalah rasa sakit dan penderitaan.⁴ Narkoba kini telah menyebar kepenjuru negara, bukan hanya dikota-kota saja bahkan dipelosok-pelosok pun juga ikut menikmati bahan berbahaya tersebut. Bukan hanya dari kalangan menengah keatas, dan tak jarang juga kalangan menengah kebawah juga menggunakan bahan tersebut. Factor ekonomi menjadi penyebab utama semakin menyebarnya narkoba dimana-mana. Bukan dari pemakainya saja namun penjual dan mengedar merajalela. Dan selanjutnya factor sosial, karena lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh dengan bertumbuhnya narkoba dimana-mana.

³ Fedri Rizki Rahmadan, “Analisis Penanggulangan Kejahatan Penyalagunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa”, jurnal, thn. 2017

[illegible]

3. Kuratif, atau yang disebut dengan pengobatan. Program ini ditujukan kepada pemakai narkoba yang ketergantungan dan menyembuhkan penyakit pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba.
4. Rehabilitasi, upaya program pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakaian narkoba yang sudah menjalani program sebelumnya yaitu pengobatan.
5. Represif, merupakan program penindakan lanjutan terhadap penjual, bandar, pengedar dan pengguna berdasarkan hukum yang berlaku. Program yang sudah menjadi wewenang badan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan mengendalikan pembuatan ataupun pembagian atau penyaluran semua bahan yang tergolong dalam narkoba.

Semakin banyaknya pengguna dan pengedar di Sidoarjo. Seperti yang dikatakan oleh mantan pengguna narkoba bahwasannya:

4

Karena rata-rata bandar lebih banyak didalam penjara dan mereka bisa melakukan jual beli narkoba dengan mudah.”⁷

Kondisi milenial di Sidoarjo dari wawancara yang dapat saya tangkap bahwa faktor lingkungan menjadi faktor utama menyebarnya narkoba di Sidoarjo. yang awalnya mereka hanya penasaran untuk mencoba narkoba dan mereka akhirnya tidak bisa berhenti mengonsumsi narkoba lalu ketagihan. Faktor ekonomi juga termaksud faktor banyaknya narkoba menyebar dimana-mana. Penjualan narkoba sangat menguntungkan kondisi perekonomian mereka. Itu membuktikan bahwa faktor ekonomi adalah faktor yang mempengaruhi narkoba tidak bisa berhenti karena siklusnya terus berputar dan saling membutuhkan satu sama lain.

Sasaran BNNK Sidoarjo dalam menekankan pengurangan penggunaan narkoba sangat banyak diantaranya seperti pemerintah, swasta, masyarakat, PKK, karang taruna, IPPNU, Banar, Fatayat dan masih banyak yang lain. sekolah juga menjadi sarana penting bagi pemberian sosialisasi atau penyuluhan tentang narkoba, baik dari pendidikan, guru serta murid didiknya. Seperti yang dikatakan Mbak Widia:

“generasi milenial merupakan generasi penerus yang perlu diperhatikan lebih agar terhindarkan dari penyalahgunaan narkoba. Menurut saya generasi milenial juga paham serta paham dan dekat sekali dengan teknologi dimana mereka bisa dengan mudah untuk sering informasi bahkan memberi pengarahan atau penyuluhan kepada orang lain, contohnya seperti Duta Anti Narkoba. Dimana mereka bisa lebih muda memberikan penyuluhan atau sosialisasi sebaya seumuran mereka karena bisa dengan mudah memahami. Mereka juga bisa melakukan kampanye melalui media sosial dengan mudah dan menyebar luaskan dengan cepat melalui kemudahan teknologi”

Dalam hal ini menjelaskan bahwa BNNK Sidoarjo memberi wadah bagi para generasi milenial untuk bisa ikut serta dalam penanggulangan narkoba, dimana mereka diberi bekal atau bimbingan untuk bisa melakukan sosialisasi dilapangan. Dan sasaran BNKK yang menjurus khusus yang langsung ke generasi milenial sendiri juga ada. Dengan bantuan Duta Anti Narkoba

⁷ Mantan pengguna narkoba, wawancara dilakukan pada tanggal 9 Juli 2020, pukul 15.18 wib

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan kepada dinas atau instansi terkait di Kabupaten Sidoarjo sehingga dalam penerapan implementasi program penanggulangan dan penyalahgunaan narkoba dapat disesuaikan dengan kondisi para generasi milenial di Kabupaten Sidoarjo. Serta dapat memberikan masukan bagi para pembuat kebijakan dalam mendukung terwujudnya implementasi program penanggulangan dan penyalagunaan narkoba yang lebih tepat dan lebih baik.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya khususnya program studi Ilmu Politik dan menjadi referensi dalam mengembangkan wawasan keilmuan dibidang ilmu sosial dan politik.

Dalam sebuah penelitian diperlukan pembatasan yang dapat menjelaskan suatu konsep secara singkat dan jelas, dengan demikian maka konsep dasar penelitian ini ialah:

Implementasi biasanya dilakukan setelah sebuah kebijakan atau peraturan dibuat, proses pelaksanaan kebijakan ini ialah deretan aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan atau peraturan kepada masyarakat sehingga kebijakan atau peraturan tersebut dapat membawa hasil yang baik dan maksimal seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat.⁹

⁹ Affan Gaffar, “Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) Hlm 295.

melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (memberikan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Maka implementasi dapat diartikan sebagai suatu proses melaksanakan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk Undang – Undang Daerah, Pemerintah Eksekutif ataupun Dekrit Presiden.

Dalam arti yang seluas-luasnya, implementasi dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian/pengorganisasian aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan Undang – Undang menjadi kesepakatan bersama diantara berbagai kepentingan, aktor, organisasi, prosedur dan dengan demikian tersebut digerakkan untuk bekerjasama untuk menegakkan kearah tertentu yang sudah dihendaki. Sikap rasional dibalik langkah seperti ini tak lain dimaksudkan untuk perilaku, dan pikiran dari semua pemegang kepentingan dapat lebih terkontrol serta tetap terjaga pada jalur tujuan dan sasaran program kebijakan itu sendiri.

menjadi kesepakatan bersama diantara berbagai kepentingan, aktor, organisasi, prosedur dan dengan tersebut digerakkan untuk bekerjasama untuk mener kearah tertentu yang sudah dihendaki. Sikap rasional dibalik langkah seperti ini tak lain dimaksudkan perilaku, dan pikiran dari semua pemegang kepentingan dapat lebih terkontrol serta tetap terjaga pada jalur tujuan dan sasaran program kebijakan itu sehingga dapat dicapai dengan benar.¹² Dengan adanya Undang berlaku, implementasi dapat berjalan dengan atau disepakati oleh keputusan bersama maka dapat pula sesuai apa yang diharapkan.

sesuai apa yang diharapkan.

ant Nugroho Dwijowijoto, “*Kebijakan Publik Formulasi: Implementasi dan Evaluasi*” (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004) Hlm 158.

chun Abdul Wahab, “*Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Publik*”, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017) Hlm 135.

d. Hlm 133.

¹² Ibid. Hlm 133.

rileks dan perasaan melambung atau naik (high). Perasaan itu lalu dicari mula-mula pemakaiannya. Itu sebabnya narkoba digunakan. Ternyata setelah perasaan naik, terjadi perasaan 'turun' atau pengaruh sebaliknya, seperti gelisah, cemas dan sulit tidur. Untuk menghilangkan perasaan turun atau pengaruh buruk itu, orang-orang menggunakan narkoba lagi. Jika dipakai berulang kali, menjadi kebiasaan, dan menyebabkan gangguan kesehatan tubuhnya, perilaku, dan perilakunya, jika sudah demikian, tidak ada lagi rasa nyaman akan tetapi yang ada rasa sakit dan penderitaan.¹³ Ketergantungan dengan narkoba merupakan penyalahgunaan narkoba yang berat. Orang yang sudah ketergantungan sulit mengendalikan diri pemakaiannya dengan narkoba. Jika suatu saat penggunaan narkoba dihentikan atau jumlahnya dikurangi maka yang terjadi, pengguna narkoba akan mengalami putus zat. Dan pemutusan zat tergantung dengan pemakaian narkoba yang digunakan penggunaannya. Contohnya seperti ketergantungan rokok mengandung nikotin. Dimana jika hal itu dilakukan maka perokok akan merasakan sakit kepala dan tangan gemetar. Hal itu

Dengan rumitnya masalah penyalahgunaan narkoba, maka pola penanggulangannya harus lebih ditekankan dalam pencegahan disamping pengobatan dan rehabilitasi. Selain itu, segala upaya

¹⁴ Ibid, hal.21

narkoba (penyakit yang tidak langsung disebabkan oleh narkoba), seperti HIV/AIDS, hepatitis, pneumonia dan lain-lain²⁰

4. Rehabilitasi, adalah upaya pemulihan kesehatan yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang menjalani program kuratif. Tujuannya agar tidak terdapat kambuh dan bebas dari penyakit yang disebabkan pemakaian narkoba. Rehabilitasi adalah fasilitas semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang yang dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki. Rehabilitasi narkoba adalah tempat yang memelihara keterampilan dan pengetahuan untuk menghindari narkoba.²¹ Dalam UU RI No.35 Tahun 2008, rehabilitasi, yaitu:

- a. Rehabilitasi medis, suatu kegiatan pengobatan dan membebaskan pecandu dari ketergantungan

- a. Rehabilitasi medis, suatu kegiatan pengobatan secara terpadu dan membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba
- b. Rehabilitasi sosial, suatu kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial. Dan para pecandu dapat beraktifitas kembali seperti dahulu

arjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalagunaannya*, ed.Daniel P.purba
(t.th), hal.102
an, *Narkoba Telah Merubah Rumah Kami Menjadi Neraka*, Departemen
DirjenDikti, 2000, hal. 37

²¹ Soeparman Herman, *Narkoba Telah Merubah Rumah Kami Menjadi Neraka*, Departemen Pendidikan Nasional-Dirjen Dikti, 2000, hal. 37

ketegangan atau ketakutan.

3. Menanggapi pengaruh sosial. Memakai narkoba menjadi remaja tampak jantan, dewasa atau keren. Mereka diterima dan diakui oleh kelompok sebannya. Mereka meniru apa yang dilakukan idola mereka. Media massa sering menggambarkan kebutuhan orang yang merasa sebagai bagian dari gaya hidup, dengan merokok, alkohol dan memakai narkoba.²⁷

Faktor resiko tinggi seseorang remaja memungkinkan penyalahgunaan narkoba dapat berasal dari mana saja, dan tersebut dapat berasal dari individu itu sendiri, keluarga, kelompok sebaya, sekolahan, tempat kerja dan juga masyarakat. Begitu dengan faktor pelindungan yang memungkinkan remaja terlindungi dari penyalahgunaan narkoba. Maka semakin kuat faktor pelindungan maka semakin kecil juga faktor adanya penyalahgunaan narkoba.

1. Komunikasi yang jujur, terbuka dan akrab antara orang tua dan anaknya yaitu dialog, bukan komunikasi searah dan bersifat otoriter, dimana anak tidak diberi kesempatan untuk berbicara dan orang tua lebih banyak menasehati daripada

1. Komunikasi yang jujur, terbuka dan akrab antara orang tua dan anaknya yaitu dialog, bukan komunikasi searah dan bersifat otoriter, dimana anak tidak diberi kesempatan untuk berbicara dan orang tua lebih banyak menasehati daripada

²⁷ Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo, *Modul untuk orang tua, Mencegah Lebih Baik Dari Pada Mengobati*, Hal. 43-45, 2012

Jika hendak mengoreksi, koreksilah perbuatannya, pribadinya.

3. Kemampuan anak berpikir jernih dan menggunakan nalar sehat, yang diperoleh anak dari percakapannya dengan orang tua, yang juga bersifat rasional, tidak emosional. Anak menggunakan nalar sehat, serta aturan yang adil dan konsisten, dimana anak belajar menanggung resiko dari kesalahan yang dilakukannya. Orang tua membahas dengan anak berbagai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.
4. Kemampuan memecahkan masalah sehari-hari, dikembangkan anak dari kesempatan dan kemampuan menelaah setiap kesulitan yang dihadapi dan upaya mencari jalan keluarnya, dimotivasi oleh orang tua menghargainya. Orang tua membimbing dan mendorong anak mencari jalan keluar, dengan menawarkan beberapa alternatif pemecahan masalah yang praktis.²⁸

4. Kemampuan memecahkan masalah sehari-hari, yang dikembangkan anak dari kesempatan dan kemampuan untuk menelaah setiap kesulitan yang dihadapi dan upaya mencari jalan keluarnya, dimotivasi oleh orang tua yang menghargainya. Orang tua membimbing dan mendorong anak mencari jalan keluar, dengan menawarkan beberapa alternatif pemecahan masalah yang praktis.²⁸

4. Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari NARkotika, PsiKOtropika dan Badan Adiktif Lain. Narkoba adalah obat, bahan atau zat, bukan makanan, yang jika masuk ke dalam tubuh manusia berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan syarat pusat). Pengaruh narkoba adalah mengubah suasana hati atau perasaan

²⁸ Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo, *Modul untuk orang tua, Mencegah Lebih Baik Dari Pada Mengobati*, Hal. 153, 2012

undang.

b. Contoh bahan adiktif: nikotin, yang terdapat dalam tembakau rokok, alkohol, minuman keras, inhalansia/solven. Bahan ini merupakan pelarut dan mudah menguap, yang terdapat dalam keperluan rumah dan perkantoran. Seperti, lem dan thinner. Bahan ini merupakan bahan yang berbahaya, karena menimbulkan ketergantungan.

Namun ada juga narkoba yang digunakan sebagai obat, yang penggunaannya harus mengikuti aturan atau petunjuk dokter. Karena narkoba penggunaannya mengakibatkan ketergantungan maka penggunaannya hanya terbatas saja yang bisa digunakan untuk pengobatan. Contohnya:

- Morfin dan petidin, untuk menghilangkan rasa nyeri pada penyakit kanker atau ketika dioperasi

- Morfin dan petidin, untuk menghilangkan rasa nyeri karena penyakit kanker atau ketika dioperasi
- Amfetamin untuk mengurangi nafsu makan
- Obat penenang/tidur untuk mengobati rasa cemas dan gangguan tidur

Akan tetapi, tidak semua obat tergolong dalam narkoba. Contohnya seperti antibiotika.

dan perkantoran. Seperti, lem dan thinner. Bahan merupakan bahan yang berbahaya, karena menimbulkan ketergantungan.

Namun ada juga narkoba yang digunakan sebagai obat, yang penggunaannya harus mengikuti aturan atau petunjuk dokter. Karena narkoba penggunaannya mengakibatkan ketergantungan maka penggunaannya hanya terbatas saja yang bisa digunakan untuk pengobatan. Contohnya:

- Morfin dan petidin, untuk menghilangkan rasa nyeri pada penderita penyakit kanker atau ketika dioperasi

pengguna akan terbiasa dengan untuk merokok sesudah sarapan. Hal itu akan menjadi suatu kebiasaan. Karena mereka menganggap apabila tidak merokok setelah sarapan akan ada rasa hilang, atau mereka tidak bersemangati lagi untuk melakukan dipagi hari itu. Hal tersebut akan terus dilakukan sampai akhirnya pada keputusan merokok secara teratur.

Dalam islam pun menjelaskan bahwa narkoba itu haram dikonsumsi bukan dalam keadaan darurat Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, “Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram dikonsumsi walau tidak memabukkan” (Majmu’ Al Fatawa 204).³¹ Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.” (QS Al E’An 195). “Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya

Dalam islam pun menjelaskan bahwa narkoba itu haram dikonsumsi bukan dalam keadaan darurat Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, “Narkoba sama halnya dengan zina, memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram dikonsumsi walau tidak memabukkan” (Majmu’ Al Fatawa 204).³¹ Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.” (QS Al E-Imran 195). “Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya

³² <https://muslim.okezone.com/read/2020/06/25/614/2235995/5-dalil-haramnya-narkoba> (diakses pada tanggal 19 Agustus 2020, pukul 20.20 WIB)

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini, maka peneliti akan memaparkan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi konseptual.

BAB II : KAJIAN TEORITIK yang terdiri atas penelitian terdahulu, kajian pustaka, dan teori implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN yang meliputi pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pemilihan subyek penelitian dan informan, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pemeriksaan keabsahan data dan sistematika pembahasan

BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA yang membahas proses analisa antara teori implementasi kebijakan terhadap program penanggulangan dan penyalahgunaan narkoba di kalangan milenial di kabupaten Sidoarjo

BAB V_x : PENUTUP yang meliputi kesimpulan dan saran

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. PENELITIAN TERDAHULU

Dalam penulisan penelitian ini guna untuk mengali dari beberapa sumber penelitian yang terdahulu sebagai bahan referensi penelitian yang akan dikembangkan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Abd. Aziz Hasibuan yang berjudul **Narkoba dan Penanggulangannya**. Dari penelitian tersebut menghasilkan Semenjak diterbitkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sampai sekarang belum menunjukkan hasil yang memuaskan (berkurangnya pengguna narkoba) sebagaimana upaya kebijakan kriminal Pemerintah untuk penanggulangan narkoba di Indonesia dengan bentuk *dekriminalisasi*. Upaya *dekriminalisasi* bagi pecandu narkoba melalui kebijakan pemerintah dengan menerbitkan Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesungguhnya dimaksudkan untuk dapat melakukan pencegahan sebelum terjadinya penyalahgunaan narkoba dan menegakkan hukum setelah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Ternyata, pada tatanan implementasinya UU tersebut tidak bekerja secara efektif. Salah satu contohnya mengenai cara-cara penerapan sanksinya. Model dekrimialisasi yang diperuntukkan untuk pecandu narkoba, sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi dan menanggulangi dengan memberikan pembinaan dan merahabilitasi belum menunjukkan nilai yang memuaskan, yang terlihat, cara-cara yang digunakan dalam mengimplementasikan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika itu lebih mengedepankan sistem penal (penjara) dari pada sistem non penal (rehabilitasi). Dengan demikian, adalah salah satu alasan kenapa pengguna narkoba lebih banyak terdapat menghuni penjara dari pada kalangan yang memanfaatkan fasilitas terapi dan rehabilitasi.³³

³³ Abd. Aziz Hasibuan, *Narkoba dan Penanggulangannya*, STUDIA DIDAKTIKA: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan. Vol. 11, No. 1, 2017

berdasarkan penelitian diatas penelitian ini membahas Peran bimbingan konseling Islam di dalam upaya penanganan korban pengguna narkoba menjadi sangat kompleks, karena selain perawatan baik medis maupun psikhis, juga bimbingan sosial, mental dan spiritual. Hal ini tidak mungkin bisa dilakukan pembimbing dan konselor sendirian, tetapi butuh bantuan dari pihak lain yang kompeten menangani medis, sosial dan moral spiritual sehingga banyak balai rehabilitasi menjalin kerjasama dengan rumah sakit jiwa, kementrian agama, balai latihan kerja, dinas sosial dan pemerintah masyarakat sekitar untuk menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan mereka kembali menggunakan barang-barang tersebut.

- ⁴⁰ Drs. H.Hayatsyah.M.Pd, *Implementasi PIMANSU dalam Pencegahan Narkoba* (Telaah Pendidikan Islam), Jurnal EduTech Vol. 3 No. 1 Maret 2017

[illegible]

dilakukan Polri, bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba oleh Polri khususnya Polda DIY sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.⁴²

Penelitian ini adalah “ *Implementasi Program Penanggulangan dan Penyalagunaan Narkoba Di Kalangan Milenial Di Kabupaten Sidoarjo*”. Fokus penelitian ini adalah studi kasus mengenai implemenntasi program penanggulangan dan penyalagunaan narkoba di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini akan mengkaji apa saja yang sudah dicapai BNN dalam penanggulangan dan penyalagunaan di Tahun 2019 ini dan apa saja faktor pendukung dan penghambat proses berjalannya implementasi Program Penanggulangan tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah berdasar pada efektifitas program yang menjadi penunjang tambahan dalam penelitian ini dan dilaksanakan pada seluruh generasi milenial dari kalangan apapun di Kabupaten Sidoarjo.

B. KERANGKA TEORI

1. Teori Implementasi Kebijakan

Efektivitas pelaksanaan kebijakan merupakan pengukuran terhadap tercapainya tujuan kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Implementasi kebijakan berkaitan dengan sejauh mana implementasi yang dilakukan telah mencapai tujuan yang diharapkan. Riant Nugroho mengemukakan bahwa terdapat lima “tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan.⁴³

1. Tepat Kebijakan

Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah. Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan

⁴² Nabila Emy Mayasari, *Kebijakan BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Polri dalam Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika di Yogyakarta*, Skripsi, 2015

⁴³ Riant Nugroho, "Public Policy Dinamika Kebijakan Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan" (Jakarta: PT Gramedia, 2008) hal 249

penduduk, yang mempunyai derajat politik tinggi seperti pertahanan dan keamanan sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang baik memberdayakan masyarakat seperti penanggulangan kemiskinan sebaliknya diselenggarakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Dan pembangunan industry besar kecil dan menengah yang tidak strategis sebaiknya diselenggarakan oleh masyarakat.

3. Tepat target

Target yang dicari sesuai dengan apa yang direncanakan dan tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan campur tangan kebijakan. Kesiapan buktinya secara alami, tetapi merupakan kondisi dimana pemerintah dalam keadaan siap saat diintervensi atau tidak. Apakah campur tangan implementasi kebijakan tepat

3. Tepat target

4. Tepat lingkungan

35

5. Tepat proses

- Penerima kebijakan yaitu, pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
- Adopsi kebijakan yaitu, pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
- Kesiapan strategi yaitu, pemerintah siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan dan birokrat siap menjadi pelaksana.

36

kepatuhan atas dasar pandangan seperti inilah Van Metter dan Van Horn kemudian berusaha membuat tipologi kebijakan menurut:⁴⁴

- Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan
- Jangkauan dan lingkup komitmen terhadap tujuan di antara para aktor, pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi

Implementasi pada program-program publik biasanya kebanyakan akan berhasil ketika perubahan yang dihendaki relatif sedikit. Sementara komitmen terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan, relatif tinggi. Hal lain yang juga dikemukakan oleh kedua ahli pakar kebijakan diatas istilah yang menghubungkan antara kebijakan dan kinerja seseorang dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (*independent variable*) yang saling berkaitan satu sama lain. Variabel – variabel yang dimaksud adalah:⁴⁵

1. Standar atau Ukuran dan Tujuan Kebijakan
“Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan, sehingga faktor lingkungan dalam hal ini sangat mempengaruhi ketertarikan antara proses kebijakan dan keberhasilan kebijakan”
2. Sumber-Sumber Kebijakan
“Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.”
3. Ciri-Ciri atau Karakteristik Badan atau Instansi Pelaksana
“Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri – ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.”

⁴⁴ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017) hal 164

⁴⁵ Ibid. Hal 165

“Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tindaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang – orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.”

“Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan politik. semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak – pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan – kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi begitu pula sebaliknya.”

“Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah diterapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.”

[illegible]

[illegible]

C. Pemilihan Subjek Penelitian

1. Pemilihan Informan

Menurut Suharsimi seperti yang dikutip dari Burhan Bungin informan penelitian adalah seseorang atau individu yang menjadi sumber informasi dari sebuah data terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian.⁴⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai mana penerapan implementasi program penanggulangan dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sidoarjo

Maka dari itu, informan yang dipilih dari subjek penelitian ini merupakan aktor-aktor yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam implementasi program penanggulangan dan penyalagunaan narkoba meliputi: Seksi Pencegahan & Pemberdayaan Masyarakat (P2M) yang berguna memberikan berbagai ilmu atau masukan melalui sosialisasi guna menanggulangi pengurangan penggunaan narkoba semakin merajalela, pengguna narkoba memberikan informasi bagaimana menggunakan sampai dampak penggunaan narkoba, mantan pengguna (khususnya yang sudah direhab oleh BNN) untuk memberikan informasi bahwa untuk mereka yang menggunakan narkoba juga bisa sembuh dan bisa hidup sehat seperti dulu lagi, memberikan ilmu yang mereka dapat setelah mendapat bantuan rehab. Menurut peneliti subjek tersebut dapat membantu dalam memberikan informasi ataupun data yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti ini. Dimana pihak BNN sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam menjalankan implementasi penanggulangan narkoba, pengguna narkoba sebagai masyarakat yang harus dibantu untuk mengurangi penggunaan narkoba, dan mantan pengguna narkoba bisa memberi contoh dampak baik buruknya menggunakan narkoba.

⁴⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) Hlm, 148

2. Obyek penelitian

Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Fasilitas. BNNK Sidoarjo memiliki beberapa langkah penanganan narkoba, yaitu Promotif, Preventif, Kuratif, Rehabilitatif dan Represif.

Penerapan kebijakan yang dilakukan BNNK Sidoarjo dengan melakukan berbagai cara contohnya seperti sosialisasi yang dilakukan melalui media online, media cetak atau terjun langsung ke lapangan. Sosialisasi yang dilakukan BNNK Sidoarjo bertujuan untuk memberi pengarahan atau ilmu tentang narkoba, bahaya narkoba dan dampak berkepanjangan penggunaan narkoba secara berlebihan.

D. Tahap-tahap Penelitian

a. Tahap Pra Lapangan

Dalam tahap ini, peneliti dapat menggali informasi tentang Implementasi Program Penanggulangan dan Penyalahgunaan narkoba di Kalangan Milenial di Kabpaten Sidoarjo. Sebagai langkah awal peneliti dapat menggali informasi kepada informan yang terkait, lalu menyusun data tersebut menjadi latar belakang dan rumusan masalah. Ada beberapa langkah tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti adalah:

1) Menyusun Rancangan Penelitian

Pada tahapan ini peneliti membuat proposal penelitian, yang mana dalam tahapan menyusun rancangan penelitian kualitatif berisi: a) Latar belakang masalah, b) Kajian kepustakaan, c) Pemilihan alat penelitian, d) Rancangan pengumpulan data, e) Rancangan analisis data, f) Rancangan perlengkapan yang dibutuhkan dalam penelitian, g) Rancangan pengecekan kebenaran atau keabsahan data.⁴⁹

⁴⁹ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung PT. Remaja, 2006) hal 86.

2) Memilih Lapangan Penelitian

Langkah terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan turan lapangan penelitian adalah dengan mempertimbangkan, pergilah dan jejakilah lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang berada dilapangan. Misalkan dengan memepertimbangkan segala keterbatasan geografis dan praktis, seperti halnya waktu, biaya, tenaga ketika melakukan penelitian di BNN Kabupaten Sidoarjo, rumah narasumber 1 dan 2

3) Mengurus Perizinan

Langkah awal yang harus diketahui oleh peneliti ialah siapa saja yang berkuasa dan berwenang memberikan izin bagi pelaksana penelitian. Tentu saja peneliti jangan pernah mengabaikan izin dan meninggalkan tugas. Hal pertama yang perlu dimintakan dari atasan peneliti sendiri, apakah ketua jurusan, dekan fakultas, kepala instansi seperti pusat dan lain-lain yang ditujukan ke dinas yang terkait.⁵⁰

b. Tahap Lapangan

1. Wawancara Mendalam

Dalam tahap ini peneliti akan melakukan interview atau wawancara mendalam dengan mencari informan yang tepat supaya memperoleh data yang maksimal. Informan yang dipilih yaitu Penyuluh Narkoba Ahli Pertama, Seksi Pencegahan & Pemberdayaan masyarakat BNN Kab. Sidoarjo, Pengguna narkoba dan mantan pengguna narkoba.

2. Pengumpulan Dokumen

Setelah interview atau wawancara dilakukan peneliti lalu mengumpulkan data yang ada di lapangan. Pengumpulan

⁵⁰ Ibid, hal 91

b. Wawancara

Wawancara ialah cara yang dilakukan peneliti menemukan permasalahan-permasalahan dengan pihak diajak wawancara untuk dimintai pendapat atau ar tentang implementasi program penanggulangan peyalahgunaan narkoba dikalangan milenial di Kabupaten S untuk mengutarakan ide-idenya. Tujuan wawancara dil dengan pihak tersebut agar data yang digali p tidak melebar dari topik yang ditentukan dan hanya fo judul yang akan diteliti oleh peneliti.

Dalam melakukan wawancara peneliti harus m tujuan untuk mengerti banyak hal-hal dari subye yang lebih mendalam, dan dalam hal ini dapat dil

b. Wawancara

Dalam melakukan wawancara peneliti harus memiliki tujuan untuk mengerti banyak hal-hal dari subyek data yang lebih mendalam, dan dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara peneliti wajib turun ke lapangan secara langsung mendatangi tempat informan lalu peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada informan setelah itu informan memberi jawaban dan yang terakhir hasil wawancara dapat disimpulkan dan dijabarkan secara merinci.

⁵² Burhan Bungin. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003) hal 66

- 1) Penyuluh narkoba ahli pertama, seksi pencegahan & pemberdayaan masyarakat BNN Kab. Sidoarjo
- 2) Pengguna narkoba
- 3) Mantan pengguna narkoba

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah menyatukan data dengan mengambil data dari dokumen, atau catatan-catatan yang selaras dengan permasalahan yang akan diteliti. Dokumentasi digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Pemakaian dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kevalidan data dan mengukur layak tidaknya suatu data yang digunakan untuk mengetahui efesiensi. Dokumentasi digunakan untuk menjawab permasalahan dari penelitian yang akan dicari dalam dokumen maupun pustakaan. Peneliti menggunakan dokumentasi untuk memperoleh data tentang hasil laporan kegiatan yang telah dilakukan untuk mengetahui hasil kinerja implementasi penanggulangan dan penyalahgunaan narkoba dikalangan milenial di Kabupaten Sidoarjo.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dimana teknik pengambilan sampel

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Hasil pengumpulan data tentu saja perlu direduksi. Istilah reduksi data dalam penelitian kualitatif dapat disejajarkan maknanya dengan istilah pengolahan data, mencakup kegiatan mengikhtisarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-milahnya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu.⁵⁴

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya, dan mencarinya bila perlu.

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011) hal 281

⁵⁴ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003) hal 70

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dalam penelitian ini, kesimpulan yang sudah diperoleh melalui tahap reduksi data serta penyajian data yang ditemukan bukti yang kuat berupa Implementasi penguatan penanggulangan dan penyalagunaan narkoba di kalangan milenial di kabupaten Sidoarjo serta hasil dari wawancara bersama dengan informan penelitian. Setelah mendapatkan data dan fakta di lapangan peneliti dapat menyimpulkan bahwa perlu adanya solusi terkait permasalahan tersebut.

Menurut Lexy J. Moleong untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability). Untuk menjaga keabsahan data maka

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Setting Penelitian

Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyangga ibu kota Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat. Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112°5' dan 112°9' Bujur Timur dan antara 7°3' dan 7°5' Lintang Selatan. Keberhasilan yang dicapai karena berbagai potensi yang ada di wilayahnya seperti industri dan perdagangan, pariwisata serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan baik dan terarah. Dengan adanya berbagai potensi daerah serta dukungan sumber daya manusia yang memadai, maka dalam perkembangannya Kabupaten Sidoarjo mampu menjadi salah satu daerah startegis bagi pengembangan perekonomian regional.⁵⁷

Kabupaten Sidoarjo terletak di antara dua aliran sungai yaitu Kali Surabaya dan Kali Porong yang merupakan cabang dari Kali Brantas yang berhulu di Kabupaten Sidoarjo. Daerah air tanah, payau dan air asin mencapai luas 16.312.69 Ha. Kedalam air tanah rata-rata 0-5m dari permukaan tanah.

Perikanan, industri dan jasa merupakan perekonomian utama Sidoarjo. Selat Maduran di sebelah Timur merupakan daerah penghasil perikanan, diantaranya ikan, udang dan kepiting. Maka tidak asing lagi jika sebagian besar wilayah Sidoarjo adalah pertambakan. Tak hanya itu sektor industri di Sidoarjo berkembang cukup pesat karena lokasinya yang berdekatan dengan pusat bisnis Jawa Timur (Surabaya), yang dekat dengan Pelabuhan Tanjung Perak maupun Bandara Juanda. Selain pertambakan, sektor industri kecil juga berkembang cukup baik disini, diantaranya seperti kerajinan tas dan koper di Tanggulangin, kerajinan sandal sepatu di

⁵⁷ www.sidoarjo.go.id (Diakses pada tanggal 3 Mei 2020, pukul 12.56 wib)

Penduduk merupakan faktor penting dalam membangun suatu pemerintahan dan pembangunan. Sidoarjo memiliki penduduk sebanyak 2.262.440 dengan pembagian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.140.627 dan penduduk perempuan sebanyak 1.121.813 jiwa. Kecamatan yang paling padat penghuni penduduk adalah Waru, Taman, Sidoarjo, Candi, Krian, Gedangan, Sukodono, Sedati, Tanggulangin, Buduran, Tulangan, Porong, Wonoayu, Prambon, Balangbendo, Krembung dan Tarik. Kepadatan penduduk di Kabupaten Sidoarjo bukan karena tingginya angka kelahiran, namun karena tingginya arus urbanisasi sebagai dampak dari pertumbuhan sektor industri dan perumahan di Sidoarjo serta sekaligus sebagai daerah penyangga Kota Surabaya.⁵⁸

Target mereka (yang disebut pengedar) adalah mereka anak sekolah yang penasaran dan mereka yang kurang sadar terhadap bahayanya narkoba. Rata-rata mereka ikut menggunakan narkoba

52

2. Batas-Batas Wilayah

Sebelah Utara : Kota Surabaya & Kabupaten Gresik
Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan
Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto
Sebelah Timur : Selat Madura

3. Visi dan Misi Kota Sidoarjo

Visi :

Mandiri, Sejahtera, Berkelanjutan. Dengan mengambil tema “Percepatan pembangunan Ekonomi Melalui Akses Sektor-sektor Potensial Daerah yang menjadi prioritas terhadap perencanaan pembangunan ekonomi sesuai dengan visi-misi Kabupaten Sidoarjo”. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Yang disepakati melalui RKPD Tahun 2020 dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Sidoarjo. Diharapkan bermanfaat untuk diimplementasikan pada program/kegiatan APBD tahun 2020 dan berkontribusi positif terhadap peningkatan perekonomian daerah di Kabupaten Sidoarjo.⁵⁹

Misi :

1. Pemerintah yang bersih, akuntabel
2. Perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM Koperasi dan pemberdayaan masyarakat
3. Standar pelayanan kesehatan dan pendidikan
4. Tata kehidupan masyarakat yang berbudaya, berakhlakul karimah dan berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang maha Esa, serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban
5. Infrastruktur public sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

⁵⁹ www.kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/pemkab-sidoarjo-gelar-musrembang-2020 (Diakses pada tanggal 14, pukul 20.25 WIB)

4. Kondisi Administratif

Wilayah administratif Kabupaten Sidoarjo terdiri atas wilayah daratan dan wilayah lautan. Luas wilayah daratan adalah sebesar 714,245 km² dan luas wilayah lautan berdasarkan perhitungan GIS sampai dengan 4 mil ke arah laut adalah sebesar 201,6868 km². Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 18 kecamatan, 322 desa, 31 kelurahan. Kabupaten Sidoarjo berdasarkan harga berlaku yang menjadi unggulan adalah sektor industri dan pengolahannya, diikuti sektor perdagangan dan sektor angkutan dan komunikasi. Dari ketiga sektor tersebut menjadi prioritas dalam pembangunan karena memiliki kontribusi besar bagi Kabupaten Sidoarjo.

5. Sarana dan Prasarana

Pengembangan sarana dan prasarana di Kabupaten Sidoarjo untuk menunjang perekonomian serta dinamika perkembangan wilayah. Ada beberapa strategi guna mengembangkan prasarana wilayah Kabupaten Sidoarjo, 1) pengembangan dan pembangunan sistem transportasi secara terpadu, 2) penyesuaian fungsi pembangunan jalan beserta kelengkapannya untuk mempermudah pencapaian antar kawasan. 3) peningkatan kualitas transportasi umum jalan raya, rel dan air. 4) pembangunan dan pembangunan sistem jaringan drainase. 5) meningkatkan pelayanan dan pembangunan listrik, air dan gas.

B. Profil BNNK (BADAN NARKOTIKA NASIONAL) Sidoarjo

Sejak terbentuknya UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan PP No. 23 tahun 2010 tentang BNN maka status kelembagaan BNN berubah menjadi pelaksana harian menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung terhadap presiden RI. Kehadiran UU No. 35 tahun 2009 menjadi tonggak terbentuknya kelembagaan struktur vertikal organisasi BNN di daerah. Sebagai langkah dalam program vertikalisasi BNN

C. Profil Organisasi BNNK Sidoarjo

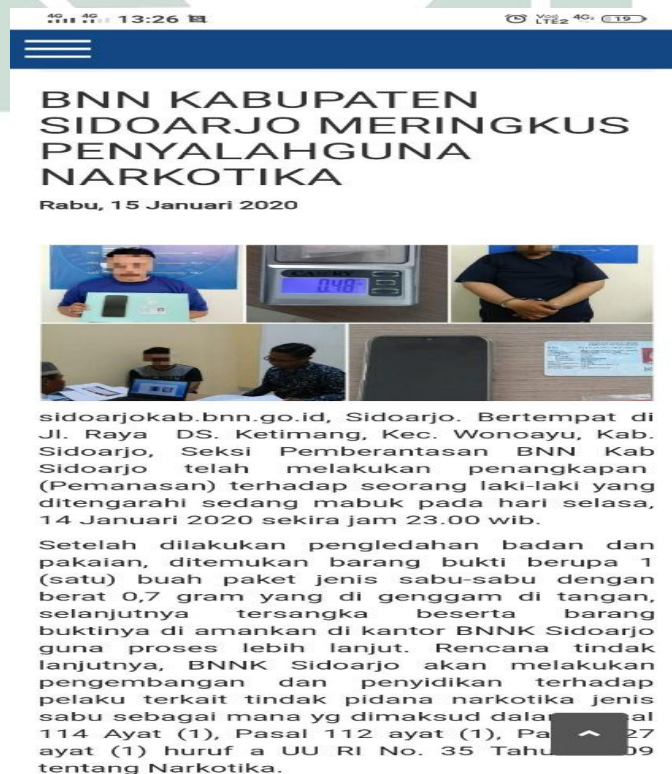
Gambar 4.1



D. Struktur Unit Kerja

1. Pemberantasan

Gambar 4.2



Gambar 4.3

Gambar 4.3 Pencegahan & Pemberdayaan Masyarakat

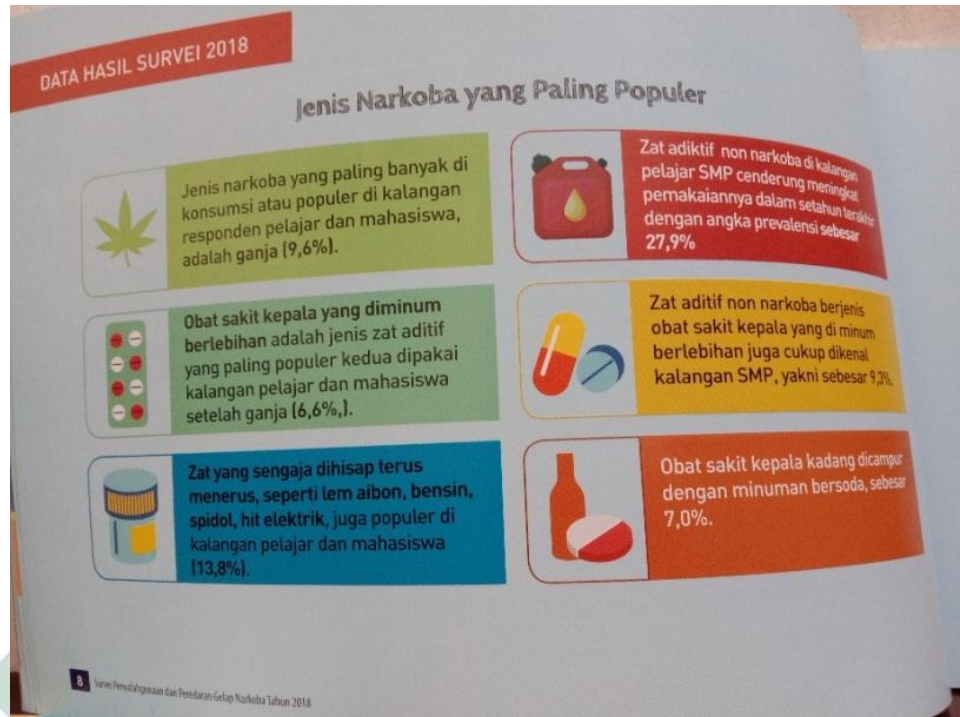


Gambar 4.4 Rehabilitasi

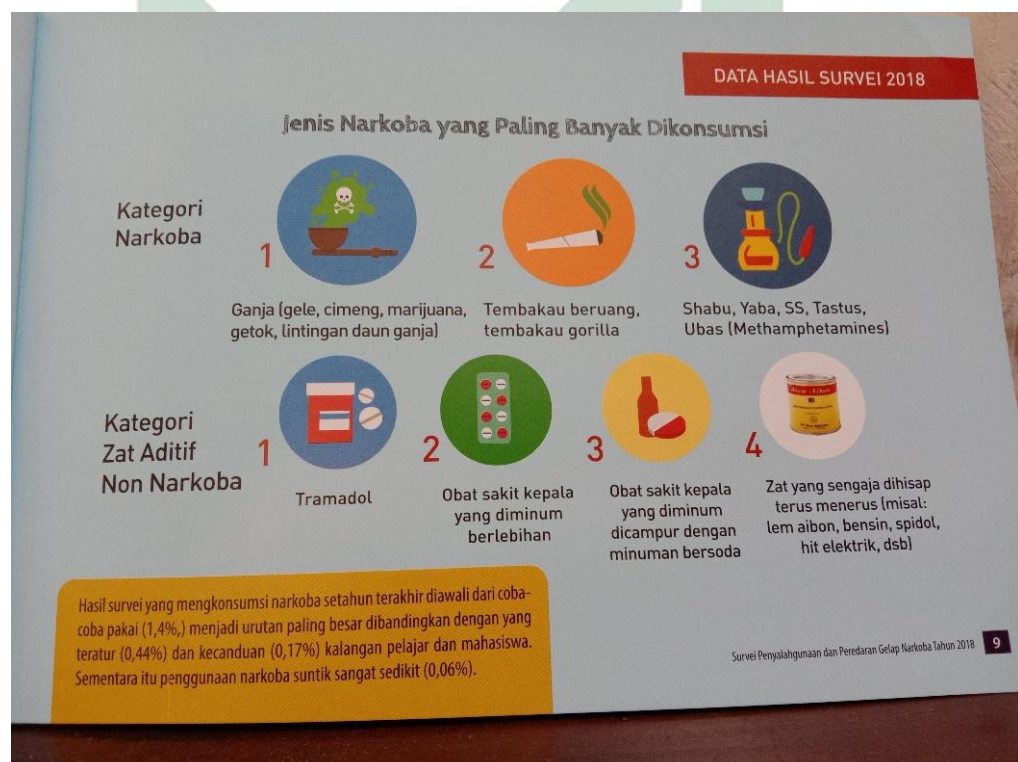


E. Macam-Macam Jenis Narkoba Narkoba

Gambar 4.5 Jenis Narkoba yang Paling Populer



Gambar 4.6 Jenis Narkoba yang Paling Banyak di Konsumsi



E. Analisis data

Di Sidoarjo sendiri memiliki Perda (Peraturan Daerah) dimana dalam undang-undang tersebut terdapat pelayanan atau aturan khusus yang menangani masalah narkoba yang ada di Sidoarjo. Dengan berkembangnya jaman, tidak hanya orang yang tua saja yang menggunakan. Tak sedikit mereka yang masih sekolah sekarang mulai penasaran dan mencoba menggunakan narkoba. Mereka yang tergolong kaum milenial untuk saat ini tidak sedikit yang mengkonsumsi. Rata-rata dari pasien rehab banyak anak-anak muda yang masa depan mereka masih bisa dipertanggung jawabkan menjadi lebih baik. Awal mula mereka mengkonsumsi bahan ini karena faktor lingkungan dan pertemanan yang kurang sehat.

Disini, penulis akan membahas mengenai informasi yang disampaikan oleh informan yang sudah dijadikan sebagai sumber data. Tentunya, dihubungkan dengan rumusan masalah yang akan dijawab nantinya. Rumusan masalah yang penulis angkat sendiri, ada 2 hal. Yaitu, apa saja bentuk program penanggulangan dan bagaimana pengimplementasian program tersebut saat di lapangan khususnya, sehingga penulis bisa mengukur aspek kualitas dari suatu bentuk program dan bagaimana pengimplementasian dilapangan yang dihadapi saat ini.

1. Program penanggulangan dan penyalagunaan narkoba yang dilakukan oleh BNNK Sidoarjo

Dalam upaya menanggulangi dan mencegah penggunaan narkoba di Kabupaten Sidoarjo BNNK Sidoarjo memiliki beberapa program yang mengacu pada Perda Nomor 3 tahun 2018 tentang Fasilitas. Ada lima program penanggulangan narkoba yaitu promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan represif. Dari kelima program tersebut memiliki fungsi atau tugas yang berbeda-beda.

a. Promotif,

Promotif sendiri adalah program yang ditunjukkan kepada mereka yang belum mengenal narkoba. Mereka yang belum mengenal narkoba diberi pengarahan tentang narkoba, juga bahayanya menggunakan narkoba itu seperti apa, dampak penggunaan dan juga efek penggunaan narkoba sendiri bagi diri sendiri dan juga orang

yaitu sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan kepada mereka yang belum mengkonsumsi narkoba dan juga bahkan yang belum tahu tentang narkoba. Program promotif ini program yang memberi wawasan kepada mereka agar bisa hidup lebih sejahtera, hidup sehat, rajin berolahraga, tidak seks bebas atau juga mengkonsumsi narkoba. Program ini bertujuan agar hidup mereka menjadi lebih baik, lebih berkualitas dan jangan sampai berfikir sampai ingin mencoba bagaimana narkoba itu.”⁶³

b. Preventif

Preventif adalah program pencegahan, dimana program ini ditujukan kepada mereka yang belum atau tidak mengenal narkoba. Program ini adalah program yang efektif untuk pencegahan penggunaan narkoba jika dibantu oleh beberapa pihak contohnya seperti lembaga masyarakat, ormas dan lain-lain. Seperti yang dikatakan Mba Widiyanti:

Preventif adalah program pencegahan, dimana program ini ditujukan kepada mereka yang belum atau tidak mengenal narkoba. Program ini adalah program yang efektif untuk pencegahan penggunaan narkoba jika dibantu oleh beberapa pihak contohnya seperti lembaga masyarakat, ormas dan lain-lain. Seperti yang dikatakan Mba Widiyanti:

⁶³Widiyawati Dyah selaku Seksi Pencegahan dan Pemeberdayaan Masyarakat, wawancara dilakukan pada tanggal 1 April 2020, pukul 15.00 wib

pembedayaan masyarakat.

c. Kuratif dan Rehabilitatif

Kedua program ini memiliki kesamaan yaitu untuk monev pengobatan dan juga pemulihan kepada pengguna narkoba. Tujuannya untuk mengobati mereka yang menggunakan narkoba sekaligus menghentikan penggunaan narkoba. Agar si pecandu narkoba tidak lagi mengkonsumsi narkoba. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Hermansyah:

“tugas pokok kita yaitu memberikan penguatan, memotivasi untuk bagian rehabilitasi dan memberikan dukungan. Rehabilitasi merupakan proses pemulihan bagi para pecandu narkoba. Pemakai narkoba sendiri terdiri dari 3 tahap yaitu perawatan rawat inpatient, dirawat menggunakan rawat jalan atau diberi pengajaran dan saran agar tidak menggunakan narkoba, teratur pakai obat pengganti narkoba.”

Kedua program ini memiliki kesamaan yaitu untuk melakukan pengobatan dan juga pemulihan kepada pengguna narkoba. Tujuannya untuk mengobati mereka yang menggunakan narkoba sekaligus menghentikan penggunaan narkoba. Agar si pengguna narkoba tidak lagi mengkonsumsi narkoba. Seperti yang dikatakan oleh Pak Hermansyah:

“tugas pokok kita yaitu memberikan penguatan, memfasilitasi untuk bagian rehabilitasi dan memberikan dukungan. Rehab merupakan proses pemulihan bagi para pecandu narkoba. Pemakai narkoba sendiri terdiri dari 3 tahap yaitu coba pakai dirawat menggunakan rawat jalan atau diberi pengarahan atau saran agar tidak menggunakan narkoba, teratur pakai dirawat menggunakan rawat jalan dan yang terakhir pecandu dirawat menggunakan rawat inap. Tahap rehab ada 5, yaitu: 1. Prekontemplasi (membela diri), 2. Kontemplasi (bimbingan), 3. Preparasi (pemilihan tempat), 4. Excion (setelah melakukan rehab), 5. Ment (pemeliharaan). Rehab sendiri ada dua cara dengan cara sukarela dan proses hukum. Dalam proses hukum sendiri juga diproses dengan dua cara yaitu diitangkap dengan surat dari Mahkamah Agung (MA) dan diproses tanpa barang bukti namun dites urin. Tetapi proses tanpa barang bukti ini hanya assessment secara medis saja. Paska rehabilitasi ada

65

A. Standar/Ukuran dan Tujuan Kebijakan

“program yang kita lakukan dengan cara sosialisasi untuk menjaga kualitas hidup masyarakat jadi lebih baik dan juga sosialisasi tentang bahaya narkoba. Kami melakukannya dgn sukarela bila ada yang ingin mengundang untuk diberi sosialisasi.”⁶⁸

Ada pun seksi Rehabilitasi melakukan atau iku terjun lapangan untuk melakukan sosialisasi, mengatakan:

[illegible]

perawatan yang dilakukan, rawat inap dan rawat jalan.

Selain seksi pemberdayaan dan rehabilitasi, ada juga pemerantasan yang memiliki peran. Mengatakan:

“Kalau kami lebih mengacu pada undang-undang, ti penyelidikan sampai penangkapan, kami mengikuti aturan undang-undang narkotika yaitu Undang-Undang No.3 2009. Karena tugas pemberantasan yairu penindakan dilakukan terhadap produsen bandar, pengedar dan dengan berdasarkan hukum yang berlaku.”⁷⁰

Selain seksi pemberdayaan dan rehabilitasi, ada juga seksi pemerantasan yang memiliki peran. Mengatakan:

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa sosialisasi yang dilakukan bukan hanya satu bagian saja, namun dari beberapa bagian yang sudah pada bagian mereka masing-masing. Komunikasi yang mereka lakukan untuk mengimplementasikan kebijakan implementasi program penanggulangan narkoba ini juga sesuai dengan Impres No. 6 Tahun 2018 (P4GN). Sosialisasi dengan berbagai macam cara, dari yang langsung terjun lapangan langsung ke sekolah-sekolah, dengan menggunakan spanduk/baliho di pinggir jalan atau lewat sosial media yaitu instagram. Dengan cara seperti itu akhirnya mereka yang perlu untuk disembuhkan datang dengan sukarela karena tidak lagi takut atau waswas melakukan penyembuhan.

⁷⁰ Bapak Samsul selaku Seksi pemberantasan, wawancara dilakukan pada tanggal 18 Maret 2020 pukul 11.28 wib

C. Kateristik Agen Pelaksana

Seperti yang dijelaskan mba Widiati:

Dalam teori implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn menyatakan bahwa kinerja implementasi akan sangat dipengaruhi oleh agen para pelaksanaannya, untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya harus menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan. Karena kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standard dan sasaran tersebut.

[illegible]

D. Komunikasi Antar Organisasi

Dalam teori implementasi Van Metter dan Van Horn komunikasi ialah mekanisme dari sebuah kebijakan. Apabila koordinasi komunikasi tersebut berjalan dengan baik antar implementator maka semakin sedikit peluang pelanggaran yang ada dilapangan. Dalam hal ini apabila Seksi pemberdayaan Masyarakat, Seksi pemberantasan dan Seksi Rehabilitasi menjalin komunikasi yang baik dengan bertukar pikiran menengai dengan baik apa yang diharapkan, maka akan terjalin keharmonisan dan prospek kebijakan yang efektif. Antara bagian yang satu dengan yang lain saling berkomunikasi satu dengan yang lain untuk membahas mengenai implementasi program penanggulangan narkoba. Seperti yang dikatakan Mbak Widianti:

“Komunikasi yang kami lakukan sesuai dengan Inpres No. 6 Tahun 2018 (P4GN). Semua sudah ada aturannya masing-masing, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.”⁷³

Dari hasil temuan yang ada dilapangan bahwa peneliti dapat menyimpulkan antara bagian dari BNN Kabupaten Sidoarjo saling berkomunikasi dengan baik untuk mengurangi hal yang tidak diinginkan dan juga untuk melaksanakan kebijakan agar tercapai.

E. Sikap Para Pelaksana

Sikap para pelaksana akan sangat mempengaruhi keberhasilan dalam beberapa hal kebijakan publik. Hal yang mungkin terjadi dalam hal kebijakan, karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi yang warga sekitar yang mengenal permasalahan yang telah mereka rasakan. Namun kebijakan yang implementator laksanakan adalah kebijakan yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan. Mba widiyati menjelaskan bahwa:

⁷³ Widiyawati Dyah selaku Seksi Pencegahan dan Pemeberdayaan Masyarakat, wawancara dilakukan pada tanggal 17 Maret 2020, pukul 11.35 wib

Disini kami juga mewawancara pengguna, beliau mengatakan:

Dan disini peneliti juga mewawancarai mantan pengguna, beliau mengatakan:

Dari hasil penemuan peneliti menemukan bahwa sikap pelaksana akan mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Dapat disimpulkan yang terdapat dalam teori implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn dengan penjelasan diatas sudah bisa mengatasi permasalahan

⁷⁶ Y selaku Mantan Pengguna Narkoba, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Mei 2020, pukul 14.50 wib

namun belum maksimal seperti yang dikatakan oleh pihak BNN Kabupaten Sidoarjo.

F. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Dalam hal ini lingkungan sosial, ekonomi dan politik menjadi salah satu hal penting untuk bisa menjalankan program ini supaya sukses dan berhasil. Seperti yang dikatakan Mbak Widia:

“Dari beberapa aspek diatas yang paling menjadi hambatan kita yaitu lingkungan sosial, mengapa? Karena pada dasarnya kesadaran masyarakat yang kurang terhadap satu sama lain. Kurang peka terhadap lingkungan sekitar yang sibuk dengan individunya sendiri.”⁷⁷

Selain mewawancarai Mbak Widia, juga mewawancara Bapak Hermansyah selaku Sei Rehabilitasi. Beliau mengatakan:

“Memang yang menjadi masalah utama kita itu keadaan lingkungan sosial. Ibaratnya narkoba ini kan virus yang kenapa tidak bisa diberantas, seperti halnya saat ini virus corona semua orang dibuat ngeri takut repot bimbang, padahal narkoba pun juga bisa dikatakan seperti hal tersebut. Kurang pekaanya terhadap sekitar contoh sesama tetangga mungkin nanti yang mereka katakan “kan yang penting bukan keluarga saya” seperti itu saja sudah terlihat bahwasannya kesadaran kita terhadap sesama amat sangat kurang untuk memberantas narkoba ini. Karena kita sebagai penegak hukum atau sarana yang memadahi juga tidak bisa menanggulangi sendiri tanpa bantuan masyarakat. Kita juga harus bekerja sama satu sama lain agar narkoba seenggaknya berkurang meskipun tidak hilang”.⁷⁸

⁷⁷ Widiyawati Dyah selaku Seksi Pencegahan dan Pemeberdayaan Masyarakat, wawancara dilakukan pada tanggal 17 Maret 2020, pukul 11.35 wib

⁷⁸ Bapak Hermansyah selaku Seksi Rehabilitasi, wawancara dilakukan pada tanggal 17 Maret 2020, pukul 10.59 wib

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut,

1. BNN Kabupaten Sidoarjo melakukan program penanggulangan ini dengan berbagai program diantaranya ada 5 langkah: yang pertama Promotif yaitu dimana hal ini guna memberi pengarahan dalam bentuk sosialisasi bagaimana hidup masyarakat yang berkualitas dan hidup sehat. Karena kualitas hidup sehat juga sangat berpengaruh bagi masyarakat. Yang kedua Preventif yaitu memberikan pengarahan berdasarkan program utama yaitu program pencegahan anti narkoba. Disini masyarakat lebih diberi pendalaman pengenalan apa itu narkoba, jenis-jenis narkoba, bahaya penggunaan narkoba, dampak narkoba bagi diri sendiri. Dalam tahap ini yang sering dilakukan yaitu dengan sosialisasi. Sosialisasi secara langsung maupun dengan media sosial. Yang ketiga dan keempat menjadi satu, Kuratif dan Rehabilitasi. Kedua program ini memiliki tujuan yang sama yaitu merehab dan mengobati mereka yang ini sembuh dari narkoba. Karena mereka yang sudah kecanduan narkoba tidak bisa dengan mudah melepaskan kebiasaan buruk untuk tidak mengkonsumsi narkoba. Dan yang terakhir yaitu pemberantasan, program pemberantasan lebih mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Karena untuk memastikan semuanya mereka harus langsung terjun lapangan untuk mengawasi semua. Melakukan berbagai penyelidikan dari barang bukti, lab dan surat dari pemerintah. Dan juga melakukan penindakan serius terhadap produsen, bandar, pengedar dan juga pernakor narkoba berdasarkan hukum yang berlaku.
2. BNN Kabupaten Sidoarjo mengimplementasikan program yang mereka adakan dengan beberapa kegiatan seperti, Kampanye Anti Narkoba, Penyuluhan yang lebih detail tentang penyuluhan narkoba, memberi penyuluhan dengan memberi penyuluhan sebaya (sesuai dengan umur) dan program mengawasi. BNN Kabupaten Sidoarjo memiliki banyak bentuk sosialisasi secara sosial media atau terjun lapangan langsung. Saat terjun lapangan langsung pihak dari BNN (bagian P2M) mempunyai jadwal yang sudah ditentukan, seperti penyuluhan disekolah-

- Hunafa, 2009, *Penyalagunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Vol. 6, No.2, Agustus :219-232
- H., Hayatsyah, M.Pd, 2017, *Implementasi PIMANSU Dalam Pencegahan Narkoba (Telaah Pendidikan Islam)*, Jurnal EduTech Vol. 3 No. 1 Maret
- JURNAL ILMU DAKWAH**, 2015, Vol. 35, No.1, Januari – Juni 2, ISSN 1693-8054
- Moleong J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011)
- Mahkama Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010, Pusat Pengembangan Narkoba, Tinjauan Rehabilitasi Narkoba
- Masjkur M, 2016, *Penyalagunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Dalam Prespektif Islam*, Vol. 5, No. 9, Edisi 1, Juli-Desembember
- Partodiharjo, Subagyo. 2010. *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Esensi Erlangga
- Pina Nuri, Soedirham Oedojo, 2015. *Dukungan Pemerintah dalam Mencegah Penyalagunaan Narkoba di Kota Surabaya*, Jurnal Promkes, Vol. 3, No. 2, Desember
- Rizki, Fedri Rahmadan, 2017. Jurnal “*Analisis Penanggulangan Kejahatan Penyalagunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa*”.
- Sholihah Qomariyatus, 2015, *Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalagunaan NAPZA*, Kemas10 (2)
- STUDIA DIDAKTIKA: 2017, *(Narkoba dan Penanggulangannya)*, jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan, Vol. 11, No. 1, 2017; ISSN 1978-8169
- Sugiyono, 2010. “*Memahami Penelitian Kualitatif*”. Bandung: Alfabeta

